Pro-Kontra Budaya Lokal dan Industrialisasi: Konflik Pembangunan Pabrik Air Minum di Cadasari, Pandeglang-Banten

HS. Suhaedi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Muhamad Nandang Sunandar, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Siti Munawaroh, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Nurlaillatul Barokah, Sekolah Tinggi Agama Islam Assalamiyah Jawilan

suhaedi.uus@uinbanten.ac.id

Received: 28 Mei 2025
Accepted: 28 Juli 2025
Published: 29 Juli 2025

Copyright@2025 (authors)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract

The construction of a bottled water factory in Cadasari Village, Pandeglang, Banten, has triggered a social conflict that extends beyond economic and environmental dimensions into the realm of cultural and spiritual values. This article analyzes the dynamics of conflict arising from the clash between industrial interests and the preservation of local wisdom and traditional knowledge. Using a qualitative case study approach, the research reveals that the community's resistance stems from the perceived threat to sacred values and vital access to natural resources, particularly water. This conflict has also fostered a sense of collective solidarity and raised awareness of the importance of inclusive participation in development processes. The findings emphasize that development initiatives that disregard local cultural contexts risk generating structural tensions that hinder long-term social and ecological sustainability.

Keywords: *Social Conflict, Industrialization, Local Wisdom, Culture, Water*

Abstrak

Pembangunan pabrik air minum kemasan di Desa Cadasari, Pandeglang, Banten, telah memicu konflik sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyentuh wilayah kultural dan spiritual masyarakat lokal. Artikel ini menganalisis dinamika konflik yang muncul akibat benturan antara kepentingan industrialisasi dengan keberlangsungan kearifan budaya lokal. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, ditemukan bahwa masyarakat merespons pembangunan dengan resistensi kolektif karena merasa nilai-nilai sakral dan akses terhadap sumber daya vital, khususnya air, terancam. Konflik ini juga mendorong penguatan solidaritas sosial dan pemulihan kesadaran akan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa memperhatikan konteks budaya lokal, pembangunan berpotensi memicu ketegangan struktural yang menghambat keberlanjutan sosial dan ekologis.

Kata kunci: *Konflik Sosial, Industrialisasi, Kearifan Lokal, Budaya, Air*

A. PENDAHULUAN

Sejarah pembangunan industri di Banten menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pertanian dan perikanan ke sektor industri dan manufaktur. Kawasan ini mulai mengalami pertumbuhan industri sejak dekade 1980-an, ditandai dengan hadirnya pabrik-pabrik besar di kawasan Serang dan Cilegon yang berfokus pada industri baja, kimia, dan petrokimia. Transformasi struktural ini tidak hanya mengubah lanskap ekonomi tetapi juga memicu ketegangan sosial-budaya di wilayah pedesaan yang sebelumnya mengandalkan nilai adat dan spiritualitas dalam pengelolaan sumber daya lokal[1]. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pemerintah daerah Banten mulai membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk di wilayah Pandeglang. Meski wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai daerah agraris dan religius, kini mulai mengalami tekanan dari ekspansi industri, termasuk pendirian pabrik air minum dalam kemasan. Hal ini menandai transformasi ekonomi Banten, tetapi juga membawa tantangan serius terhadap ekosistem lokal dan budaya masyarakat tradisional.

Pembangunan sering kali dianggap sebagai jalan utama menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pembangunan tidak selalu membawa manfaat yang merata dan sering kali memunculkan konflik sosial di tingkat lokal. Konflik tersebut muncul ketika ada ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Adam Smith, pelopor ekonomi klasik, memandang pembangunan ekonomi sebagai proses peningkatan produksi dan kekayaan suatu negara yang didorong oleh empat faktor utama: jumlah sumber daya manusia, modal atau barang, tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Ia menekankan pentingnya pemupukan modal dan pembagian kerja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.[2]

Robert Lucas dan Paul Romer mengembangkan teori ini yang menempatkan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan, pelatihan, dan wawasan tenaga kerja menjadi kunci percepatan kemajuan industri dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.[3]

Emil Salim, dalam berbagai pemikirannya tentang pembangunan berkelanjutan, menyatakan bahwa pembangunan industri, termasuk pabrik, dapat membawa dampak negatif jika tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekologi akan menyebabkan pencemaran lingkungan (udara, air, tanah), kerusakan ekosistem, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar.[4]

Fenomena ini dapat dilihat dalam kasus pembangunan pabrik air minum kemasan di desa Cadasari, Pandeglang, Banten, yang memicu resistensi masyarakat setempat. Proyek tersebut dianggap membawa dampak negatif terhadap lingkungan,

---

[1] Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), p. 33-34.

[2] Ajeng Windi Astuti, et al. "Kajian Teori Pemikiran Adam Smith dan Relevansinya terhadap Perekonomian Masa Kini." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3.2 (2024), p. 472-480.

[3] Usgia Serly Lestari. *Analisis Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Studi Literatur*. (Diss. Universitas Andalas, 2019). p. 32.

[4] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi.* (Jakarta: LP3ES. 1988), p. 184.

terutama terkait ancaman budaya kearifan lokal serta eksploitasi sumber daya air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.[5]

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016-2020 yang dipublikasikan oleh BPS, sektor pertanian di Pandeglang merupakan pemberi kontribusi terbesar pertama dengan rata-rata PDRB sebesar 33,96 persen.[6] Desa Cadasari merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat setempat, terutama di sektor pertanian. Namun, pembangunan pabrik air minum kemasan oleh pihak swasta di kawasan ini menimbulkan kontroversi. Masyarakat mengkhawatirkan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan akan mengganggu ketersediaan air bagi kebutuhan domestik dan pertanian. Selain itu, ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan semakin memperparah situasi, menciptakan resistensi kolektif terhadap proyek tersebut.

Konflik yang terjadi di Cadasari bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang sering ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Ketika proyek pembangunan skala besar dilaksanakan tanpa mempertimbangkan budaya kearifan lokal serta aspirasi masyarakat dan dampak lingkungan, konflik hampir selalu menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan, alih-alih menjadi solusi tunggal, dapat menjadi pemicu ketegangan dan resistensi jika tidak dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.

Kasus perebutan sumber daya alam yang terjadi di Pandeglang saat ini, memiliki format yang sama dengan konflik agraria di daerah lain di Indonesia. Saking meningkatnya dari tahun ke tahun, menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kasusnya jadi seperti kaset baru yang berisikan lagu-lagu lama.[7] Pendekatan konflik sosial sebagai katalis perubahan menawarkan perspektif yang menarik untuk memahami dan menganalisis fenomena ini. Konflik, meskipun sering dianggap sebagai hambatan, juga memiliki potensi untuk mendorong transformasi sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memaksa pemerintah serta pihak swasta untuk mengevaluasi kembali pendekatan pembangunan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial yang terjadi di Cadasari sebagai refleksi dari realitas pembangunan di Banten, sekaligus menggali budaya kearifan lokal di Pandeglang, Banten sebagai pendorong perubahan menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.[8]

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang beragam kearifan budaya lokal serta dinamika konflik sosial dalam konteks pembangunan di Indonesia dan menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam mengelola sumber daya dan konflik sosial secara lebih bijaksana.

---

[5] https://www.radarbanten.co.id/2025/06/04/pabrik-air-kemasan-segera-berdiri-di-pandeglang/ Diakses pada 11:50. 05/07/2025

[6] Almukarromah, Fatimah. *Peran sektor pertanian unggulan terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2016-2020*. BS thesis. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022), p. 6.

[7] https://www.pinterpolitik.com/belajar-politik/mayora_vs_pandeglang/ Diakses pada 13:15. 05/07/2025

[8] Suud Sarim Karimullah, "Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 5, No.1 (2025), p. 55-81.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami konflik sosial akibat pembangunan pabrik air minum kemasan di Desa Cadasari, Pandeglang - Banten. Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil analisis ini juga diperkaya dengan temuan dari sejumlah penelitian yang relevan.[9]

1. Lokasi Penelitian

Desa Cadasari dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat konflik antara masyarakat setempat dan perusahaan yang membangun pabrik air minum dalam kemasan. Lokasi ini juga menjadi contoh nyata dari dampak konflik yang melibatkan kepentingan ekonomi dan sosial.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau asal dari mana data diperoleh untuk keperluan penelitian. Dalam konteks penelitian, sumber data ini sangat penting karena menentukan kualitas dan relevansi informasi yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[10]

Sumber data utama yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu dari orang atau objek yang mengalami atau mengetahui fenomena yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas:

   1. Wawancara dengan aktor utama (masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan perwakilan perusahaan).
   2. Observasi langsung untuk mendokumentasikan kondisi sosial dan ekologis di wilayah konflik.

b. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang sudah ada sebelumnya, baik berupa dokumen, laporan, buku, artikel, situs web, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti pemerintah atau organisasi.[11] Data ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer dan membantu memperkuat analisis penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.[12] Teknik ini sangat penting karena menentukan kualitas dan validitas data yang diperoleh sehingga mempengaruhi hasil akhir penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Wawancara Semi-Terstruktur

---

[9] Hamid Chalid, dan Arief Ainul Yaqin. "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48, No. 2 (2018), p. 411-435.

[10] Dedi Susanto dan M. Syahran Jailani. "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1. No. 1 (2023), p. 53-61.

[11] Andrew Fernando Pakpahan, et al. "Metodologi penelitian ilmiah." (2021), p. 58.

[12] Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati. "Pengumpulan data penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol 3.5 (2024), p. 5423-5443.

Wawancara semi-terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman langsung masyarakat terdampak dan memahami perbedaan perspektif di antara pemangku kepentingan.

b. Observasi Partisipatif
Observasi partisipatif adalah metode penelitian di mana peneliti ikut serta secara langsung dalam aktivitas atau kehidupan kelompok yang diteliti, sekaligus mengamati perilaku, interaksi, dan praktik kelompok tersebut dari sudut pandang orang dalam. Dilakukan di Desa Cadasari untuk menangkap dinamika sosial dan pola resistensi masyarakat.

c. Analisis Dokumen
Analisis dokumen adalah suatu kegiatan sistematis untuk menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan isi dokumen guna memperoleh informasi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengelompokkan, menyusun, dan mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat ditemukan pola, tema, atau informasi penting yang menjawab rumusan masalah penelitian.[13] Tujuan analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta menarik kesimpulan yang valid dari data tersebut

5. Integrasi Literatur

Literatur pendukung digunakan untuk menjelaskan dinamika konflik di Cadasari sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas. Studi yang dilakukan oleh Hikmawan, Indriyany, dan Hamid (2021) menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap pembangunan pabrik air minum kemasan di Cadasari mencerminkan pola umum konflik antara masyarakat lokal dan korporasi besar dalam perebutan akses atas sumber daya vital, terutama air. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa gerakan perlawanan masyarakat kerap dimotori oleh tokoh agama dan institusi pesantren, yang menggunakan simbol dan narasi religius sebagai sarana mobilisasi. Temuan ini dipertegas oleh Hamid, Indriyany, dan Hikmawan (2020), yang menempatkan konflik di Pandeglang sebagai bagian dari kebangkitan gerakan lingkungan berbasis agama yang muncul sebagai respons terhadap eksploitasi alam oleh sektor swasta. Sementara itu, Prihatini, Hayat, dan Lindawati (2023) menyoroti pentingnya kelembagaan komunitas dalam mendorong rehabilitasi lingkungan melalui pendekatan partisipatif, yang menunjukkan bahwa mobilisasi serupa juga terjadi di wilayah-wilayah lain di Pandeglang. Dengan demikian, literatur-literatur ini memberikan pijakan penting untuk memahami bahwa konflik di Cadasari mencerminkan ketegangan struktural antara pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat akan keadilan ekologis serta pelibatan sosial yang inklusif.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pandangan yang holistik terhadap konflik sosial di Cadasari sekaligus mengusulkan strategi penyelesaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan dari jurnal terkait memperkuat argumen bahwa pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal secara aktif berpotensi memicu konflik yang signifikan.

[13] Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif*. (CV. Azka Pustaka, 2023), p. 79.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pabrik air minum kemasan di desa Cadasari, Pandeglang, Banten, oleh PT. Tirta Fresindo Jaya merupakan anak perusahaan dari Mayora Group dengan merk "Le Minerale" yang lokasinya tepat di pinggir jalan Raya Serang-Pandeglang KM. 5, ini bermula dari izin yang diajukan kepada pemerintah setempat pada tanggal 28 Agustus 2013, dan pada tanggal 02 Oktober 2013 Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPR) Pandeglang menyetujui dan mengeluarkan surat izin pengoprasian dan pendirian PT. Tirta Fresindo tersebut.

Pada November hingga Desember mulai dilakukan pembangunan dan penimbunan 4 mata air dari 8 mata air yang ada di titik tersebut. Dari penimbunan tersebut dirasakan dampaknya oleh warga sekitar tidak hanya desa dan kecamatan Cadasari saja tetapi ke desa-desa dan kecamatan lainnya yang berdekatan lokasinya dengan berdirinya pabrik tersebut. Karena air mulai mengalami penyusutan.[14] Hal ini disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam, khususnya mata air, telah memicu konflik sosial yang cukup signifikan. Proyek ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan mengubah struktur sosial yang ada. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak dasar masyarakat yang terancam oleh eksploitasi sumber daya alam.

Benturan Kearifan Lokal dengan Proyek Industrialisasi

Konflik di Cadasari tidak hanya berakar pada persoalan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga pada ketegangan antara modernisasi industri dengan pelestarian kearifan lokal. Pembangunan industri yang abai terhadap konteks budaya masyarakat bukan hanya mengganggu sistem sosial-ekonomi, tetapi juga menghancurkan tatanan makna yang selama ini menopang harmoni sosial.[15] Selain berdampak pada aspek sosial-ekonomi dan lingkungan, pembangunan pabrik ini juga mengancam keberlangsungan budaya lokal masyarakat Cadasari. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan religius dengan banyak pondok pesantren, tempat majelis taklim, serta kegiatan budaya Islam yang sudah berlangsung turun-temurun. Dalam konteks budaya lokal masyarakat Banten, air bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi merupakan simbol spiritual dan keberkahan yang dijaga secara kolektif oleh masyarakat. Eksploitasi terhadap mata air di Cadasari tidak hanya dilihat sebagai tindakan ekologis, tetapi juga sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai sakralitas lokal.

Menurut data BPS Pandeglang, di Kecamatan Cadasari terdapat 53 pondok pesantren yang aktif berperan dalam pendidikan agama dan pelestarian budaya lokal.[16] Keberadaan pesantren-pesantren ini menjadi fondasi penting dalam menjaga nilai spiritual dan simbolik, terutama pengelolaan sumber daya alam seperti air, yang dilihat bukan hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi bagian dari kehidupan ritual dan keberkahan.

Masyarakat adat memiliki pandangan dunia tersendiri terhadap lingkungan yang tidak dapat digantikan oleh logika ekonomi modern. Mereka memperlakukan alam sebagai bagian dari struktur sosial dan spiritual komunitas. Eksploitasi terhadap

---

[14] https://tirto.id/berebut-tirta-di-tanah-jawara-konflik-air-di-pandeglang-clZ5 .Diakses pada 11:15. 05/07/2025.

[15] Mariyono, "Pembangunan dan Ketimpangan Sosial: Resistensi Masyarakat terhadap Proyek-Proyek Pembangunan." *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, p. 123-135.

[16] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, *Pandeglang Regency in Figures 2017*, Tabel "Jumlah Pondok Pesantren Santri dan Kiai menurut Kecamatan".

sumber daya air oleh korporasi besar seperti Mayora Group dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap nilai-nilai lokal tersebut.[17] Hal ini memperkuat resistensi masyarakat yang tidak hanya ditandai dengan penolakan administratif, tetapi juga dalam bentuk aksi kultural, seperti doa bersama, istighosah, serta pernyataan sikap tokoh pesantren yang menuntut penutupan pabrik.

Tokoh agama terkemuka di wilayah tersebut, seperti Abuya Kiai Ahmad Muhtadi Dimyathi, pemimpin Pondok Pesantren Cidahu, aktif memobilisasi warga dan santri melalui deklarasi keagamaan dan seruan moral. Ia menegaskan bahwa pembangunan pabrik di atas tanah keramat dekat makam ulama terdahulu dapat mendatangkan konsekuensi spiritual (*kualat*) bagi perusahaan. Pada momen puncak protes di Maret 2017, Kiai Matin Sarkowi bersama para kiai sepuh memimpin demonstrasi dan bahkan menggelar syukuran saat izin pabrik dinyatakan telah habis, sebagai simbol keberhasilan perjuangan moral dan spiritual masyarakat.[18]

Simbol-simbol budaya seperti sorban, tongkat kiai, kitab kuning, hingga air dalam kendi dihadirkan dalam demonstrasi sebagai bentuk penegasan bahwa penolakan mereka berakar dari nilai-nilai spiritual dan adat. Kiai dan tokoh pesantren ini tidak hanya menjadi juru bicara, tetapi juga penggerak utama dalam aksi-aksi kultural kolektif seperti istighosah, doa bersama, dan ritual simbolis yang menegaskan karakter kultural dari perjuangan tersebut.[19] Sebagian besar tokoh agama dan masyarakat adat memaknai eksploitasi air ini sebagai bentuk perampasan terhadap hak spiritual komunitas, karena air selama ini digunakan dalam berbagai praktik ibadah dan tradisi adat. Misalnya, air dari sumber tertentu sering digunakan dalam kegiatan ruwatan, manaqiban, hingga ritual pengobatan berbasis keislaman. Sehingga, ketika akses terhadap mata air tersebut mulai menyusut, masyarakat merasa kehilangan bagian penting dari identitas budaya mereka.

Dengan demikian, konflik ini bukanlah sekadar perebutan sumber daya alam, melainkan juga pertarungan simbolik dan spiritual antara kapitalisme modern dan nilai luhur kearifan lokal. Mobilisasi yang dipimpin pesantren dan kiai adalah ekspresi politik-budaya yang kuat, menunjukkan bahwa komunitas lokal tidak hanya berjuang mempertahankan tanah dan air, tetapi juga identitas dan martabat budaya spiritual mereka.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Sosial ekonomi adalah kondisi yang mencerminkan hubungan antara struktur sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat, seperti penghasilan, pendidikan, dan kepemilikan kekayaan.[20] Dampak sosial adalah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal, pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat[21]. Dampak sosial dan ekonomi adalah perubahan yang terjadi

---

[17] Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, p. 174.

[18] https://tirto.id/tipu-tipu-penutupan-pabrik-mayora-group-di-pandeglang-cl4b?utm Diakses pada 12:38. 09.07.2025.

[19] M. Hikmawan, Indriyany, R., & Hamid, A. (2021). "Mobilisasi Agama dalam Konflik Ekologis: Studi Kasus Cadasari." *Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 15, No. 2, p. 245-262.

[20] Soekanto, S., & Damsar. *Sosiologi Suatu Pengantar* ed. Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 35-36.

[21] Dwi, M. *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan terhadap Masyarakat Lokal.* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), p. 21.

pada masyarakat akibat suatu kegiatan, proyek, atau pembangunan yang mempengaruhi aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama di daerah Cadasari merasa dirugikan oleh praktik penyedotan air yang dilakukan tanpa pertimbangan terhadap keberlanjutan sumber daya yang mereka andalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan pabrik berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi untuk daerah Pandeglang sendiri, banyak warga yang merasakan kerugian dalam bentuk kehilangan akses terhadap air bersih. Dalam hal ini, masyarakat yang semula bergantung pada mata air sebagai sumber kehidupan mereka kini harus menghadapi kekurangan pasokan air yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Adapun konflik ini juga memperlihatkan bagaimana peran pemerintah daerah yang terkesan abai terhadap dampak sosial yang dihadapi masyarakat. Sebagian besar warga menganggap bahwa keputusan untuk mendirikan pabrik tidak melibatkan partisipasi aktif mereka dalam perencanaan atau konsultasi publik yang memadai bahkan dilapangan ditemukan bahwa persetujuan tandatangan warga banyak yang hanya dimanipulasi sehingga pihak perusahaan harus memberikan kompensasi terhadap warga yang telah menandatangani angket suara pendirian perusahaan itu akibat dari pemalsuan tandatangan tersebut. Pemerintah daerah pun lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yang mengarah pada ketimpangan antara pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Pentingnya memperhatikan distribusi manfaat ekonomi dalam setiap proyek pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, terutama yang melibatkan sumber daya alam vital seperti air, berisiko menyebabkan ketidakadilan yang memicu konflik. Masyarakat di Cadasari, yang tergantung pada sumber daya alam untuk penghidupan mereka, merasa tersisihkan dan dirugikan oleh keputusan yang lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek bagi perusahaan dan daerah.[22]

Dampak Ekologis dan Teknikal

Dampak Ekologis dan Dampak Teknikal adalah dua jenis dampak yang sering dianalisis dalam konteks pembangunan atau aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sistem teknis.[23] Pembangunan pabrik air minum kemasan di desa Cadasari, Pandeglang, tidak hanya memberikan dampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekologis yang signifikan. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah menyusutnya ketersediaan sumber daya air, khususnya mata air yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga. Proyek pembangunan tersebut melibatkan aktivitas penyedotan air dalam skala besar dari mata air di sekitar lokasi pabrik, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis. Eksploitasi air secara berlebihan mengakibatkan penurunan cadangan air tanah dan menurunnya kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik untuk konsumsi, pertanian, maupun sanitasi.

[22] Jacqualine G. Wenas., Herman Karamoy, dan Jenny Morasa. "Perilaku oportunistik pemerintah Kota Manado atas perubahan dana alokasi umum: suatu kajian kualitatif." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).* Vol. 7, No. 1. 2020, p. 78.

[23] Lilies Setiartiti, dan Rahmat Adiprasetya Al-Hasibi. *Monograf: Transisi Energi Terbarukan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. (Lombok; Penerbit P4I, 2024), p. 67.

Penurunan cadangan air tanah dan penyusutan mata air ini dapat berujung pada kekeringan di wilayah sekitar. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada mata air tersebut untuk kebutuhan domestik dan pertanian kini menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air bersih, bahkan meskipun mereka sudah menggali sumur dengan kedalaman lebih dari 30 meter. Dampak ini juga diperburuk dengan penurunan kualitas air tanah yang disebabkan oleh penurunan level air tanah yang tajam akibat penyedotan berlebihan. Proses ini mengganggu siklus ekosistem lokal, yang bergantung pada sumber daya air yang terjaga ketersediaannya.

Dampak ekologis dari proyek semacam ini sering kali tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan. Penyusutan mata air dan cadangan air tanah yang terjadi di Cadasari menunjukkan bahwa pembangunan pabrik air minum tidak hanya berdampak pada sumber daya air yang digunakan untuk konsumsi manusia, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem pertanian lokal. Masyarakat yang bergantung pada irigasi dari mata air kini mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan hasil pertanian mereka, yang merupakan sumber penghidupan mayoritas warga Cadasari.[24]

Dalam konteks teknikal, meskipun proyek pabrik air minum kemasan di Cadasari bertujuan untuk menghasilkan produk yang memiliki permintaan pasar yang tinggi, aspek teknis terkait pengelolaan sumber daya air harus diperhatikan lebih teliti. Proses penyedotan air yang berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kualitas air tanah dan mata air, yang pada akhirnya juga dapat merugikan pabrik itu sendiri, karena pasokan air yang terjaga adalah hal yang sangat krusial untuk keberlanjutan operasi pabrik.

Dalam sesi wawancara dengan masyarakat sekitar yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari titik pabrik bernama Maesaroh dari desa Waas Kecamatan Cadasari menuturkan bahwa setelah pabrik itu beroprasi aliran air yang biasa ia dan keluarganya gunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mencuci, mandi dan minum pun sempat mengalami penyusutan air padahal ia telah memperdalam sumurnya dengan kedalaman sekitar +/- 30 meter, demikian dengan area pesawahan yang tepat berada di belakang rumahnya sempat mengalami kesulitan air karena aliran irigasi air yang biasa mengalir ke sawah menjadi kering dan hal itu menyebabkan ketergangguan di daerah sawah menyebabkan kekering, padahal di belakang rumahnya merupakan salah satu sumber mata air yang sangat jernih yang biasa digunakan warga sekitar untuk sumber utama pengairan sawah–sawah mereka, kini setelah pabrik itu beroperasi semua sistem pengairan baik untuk ke rumah dengan sumur maupun aliran untuk irigasi sawah menjadi terhambat dan mengalami penyusutan volume atau debit air. Hal positifnya mungkin berdampak kepada pemerataan ekonomi untuk daerah-daerah selain kota besar, tetapi lebih dari itu dampak negatif yang akan dirasakan masyarakat sekitar jauh lebih banyak, dan air merupakan salah satu sumber daya alam milik rakyat yang seharusnya pemerintah bisa berpihak kepada rakyat bukan selalu kepada para investor.

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan salah satu warga yang berlokasi lebih jauh tempat tinggalnya dari titik lokasi, hal ini dilakukan apakah masyarakat yang

[24] Selain itu, Masterplan desa menyarankan bahwa pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan industri, terutama yang melibatkan penggunaan sumber daya alam vital seperti air, harus memperhitungkan dampak ekologis jangka panjang. Tidak hanya kualitas air yang harus dipertimbangkan, tetapi juga bagaimana eksploitasi air tersebut memengaruhi ekosistem yang lebih luas, termasuk vegetasi dan kehidupan fauna yang bergantung pada kualitas dan keberadaan air.

jauh dari titik lokasi berdirinya pabrik tersebut juga mengalami dampak lingkungan dengan sumber mata airnya. Narasumber bernama Toni dari desa kampung Sawah yang berjarak sejauh 4 kilometer dari lokasi pabrik pun menuturkan hal yang serupa, dampak itu dirasakan karena mengingat bahwa Cadasari merupak kawasan *Cekungan Air Tanah (CAT)* yang artinya apabila dilakukan eksploitasi atas sumber daya alam air ini pasti berdampak hingga ke beberapa desa lain nya termasuk juga ke desa Kampung Sawah ini, mengingat juga ada beberapa sawah yang memang sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar dan air adalah faktor utama untuk menghidupi sawah, jika debit air terganggu akibat eksploitasi berlebihan maka tidak menutup kemungkinan sawah pun dilanda kekeringan.

Resistensi Masyarakat dan Konflik Kepentingan

Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menghadapi pembangunan ini menunjukkan adanya perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan pengabaian hak lingkungan. Dalam menghadapi dampak pembangunan kawasan industri, masyarakat sering kali terjebak dalam dilema antara keuntungan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam menghadapi konflik ini, masyarakat tidak hanya menuntut kompensasi ekonomi tetapi juga hak untuk mempertahankan sumber daya alam mereka, yang menurut mereka adalah hak dasar yang harus dilindungi.[25]

Pembangunan pabrik air minum kemasan di Cadasari juga membawa dampak yang lebih luas, di mana hubungan manusia dengan alam semakin tergerus. seharusnya industri memperhatikan dampak ekologis yang lebih besar, seperti berkurangnya cadangan air tanah akibat penyedotan berlebihan. Masyarakat merasa bahwa meskipun pabrik dapat menyumbang pada perekonomian lokal, keberlanjutan sumber daya alam mereka yang merupakan bagian dari identitas sosial dan budaya setempat harus lebih dihargai. Apalagi Cadasari dianggap simbol daerah yang "suci" karena terdapat banyak sekali pondok pesantren dan juga para tokoh keagamaan seperti kiai dan para ustadz.

Resistensi masyarakat sering kali dipicu oleh perasaan terpinggirkan. Dalam kasus Cadasari, masyarakat menolak pembangunan pabrik air minum kemasan karena dianggap mengancam sumber daya vital mereka, yaitu air. Penelitian ini relevan untuk menjelaskan bagaimana resistensi dapat dilihat sebagai bentuk advokasi terhadap hak lingkungan yang diabaikan dalam proyek pembangunan. Serta untuk para pemangku jabatan di Banten khususnya di Pandeglang pun harus lebih bijak agar konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi di Banten, karena konflik yang bertemakan perebutan lahan dan sumber daya alam di Indonesia sendiri sudah sering terulang terjadi. Hal ini karena konflik sering muncul akibat ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan, pemerintah, dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini dapat digunakan untuk menyoroti peran pemerintah yang sering kali lebih memihak investor daripada masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus di Cadasari.

Dampak jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan menyoroti bahwa konflik dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.[26] Dalam kasus Cadasari, resistensi masyarakat sebelum membuka ruang dialog kritis tentang bagaimana kebijakan pembangunan dapat lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan mereka mengadakan demonstrasi besar-

[25] Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, eds. *Adat dalam Politik Indonesia.* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), p. 67.

[26] Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M. Nawawi. "Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Vol. 8 No.1 (2024), p. 729-738.

besaran dan memicu perbuatan anarkis dengan merusak dan menerobos masuk ke area pabrik tersebut, hal ini akibat dari abai nya pemerintah daerah atas tuntutan warga serta sulitnya warga berkomunikasi dengan Bupati setempat. Atas insiden tersebut yang dilakukan oleh ratusan warga dari berbagai desa dan kecamatan akhirnya di tindak lanjuti oleh pemerintah setempat untuk dilakukan pengkajian ulang dan penyelidikan terkait perizinan mendirikan perusahaan di lahan hijau atau kawasan *Cekungan Air Resapan (CAT)*.

Pendekatan mediasi dalam konflik sosial yang terjadi di Cadasari ini memberikan wawasan tentang pentingnya pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik.[27] Pendekatan ini melibatkan dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Sehingga diputuskan bahwa perusahaan PT. Tirta Fresindo Jaya merupakan bagian dari Mayora Group beralih fungsi dari perusahaan produksi minuman kemasan Le Minerale menjadi gudang pendistribusian yang berizin milik PT. Cipta Niaga Semesta.

Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Dampak ekologis yang ditimbulkan oleh eksploitasi berlebihan ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang – undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air di Indonesia harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepentingan masyarakat lokal.[28]

Dalam kasus Cadasari, peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak swasta perlu lebih memperhatikan perizinan yang dikeluarkan, serta memastikan bahwa pengelolaan air dilakukan dengan prinsip keberlanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Jika pengelolaan air dilakukan secara lebih bijaksana, dampak ekologis dan teknikal yang timbul dari proyek pembangunan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak ekologis dan teknikal dapat merugikan tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga berisiko merusak ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak mengabaikan kepentingan ekologis dalam jangka panjang.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia

Indonesia merupakan Negara hukum, semuanya telah diatur dalam perundang-undangan yang selalu mengalami revisi atau amandement, termasuk untuk pengaturan *Kawasan Cekungan Air Tanah* (CAT), Beberapa peraturan yang mengatur cekungan air tanah di Indonesia adalah:

---

[27] Aprilia Natasya April, et al. "Synergizing Advocacy and Communication: A Strategic Model for Sustainable Development in Non-Governmental Organizations." *Journal of Social and Policy Issues* (2024), p. 119-124.

[28] Fatma Ulfatun Najicha, dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Politik Hukum Perundang–Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2017), p. 109.

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 02 Tahun 2017: Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tahun 2017 dan termasuk dalam bidang hukum dan geologi.[29]
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011: Keputusan ini tentang penetapan cekungan air tanah.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009: Peraturan ini tentang pedoman penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah.

Selain itu, ada beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan air tanah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air

Pengaruh Konflik terhadap Perubahan Sosial

Konflik semacam ini sering memicu perubahan sosial yang signifikan, karena masyarakat terdorong untuk mengubah cara pandang mereka terhadap pembangunan di Cadasari, konflik ini telah mempercepat kesadaran akan pentingnya hak atas sumber daya alam dan peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif akan mengarah pada ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Konflik di Cadasari juga telah mengubah pola interaksi sosial antarwarga, di mana munculnya kesadaran kolektif terhadap isu lingkungan dan hak atas tanah memicu terbentuknya aliansi lintas desa, tokoh agama, dan komunitas adat. Solidaritas yang dibangun tidak hanya bersifat lokal, tetapi mulai melibatkan jaringan advokasi di tingkat regional, bahkan nasional. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dari kesadaran individual ke arah gerakan sosial yang lebih terorganisir dan berbasis nilai. Masyarakat mulai membentuk forum komunikasi, memperkuat peran tokoh pesantren atau agama dalam membimbing gerakan damai, serta aktif memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye. Transformasi ini menunjukkan bahwa konflik dapat menjadi medium pembelajaran sosial, mendorong partisipasi warga dalam ranah politik lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Konflik sosial yang terjadi di desa Cadasari, Pandeglang, akibat pembangunan pabrik air minum kemasan oleh PT. Tirta Fresindo Jaya, mengungkap berbagai ketegangan antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan hak sosial masyarakat lokal. Konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memicu resistensi kolektif dan ketidakpuasan masyarakat.

Pembangunan pabrik air minum kemasan telah menyebabkan penyusutan sumber daya air yang mengganggu akses masyarakat terhadap kebutuhan domestik dan pertanian. Dampak ekologis ini menunjukkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber

[29] Achmad Suhaemi, *Implikasi Ketidakpastian Hukum Larangan Ekspor Nikel Mentah Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Terhadap Industri Pertambangan Mineral Periode Tahun 2020–2022*. BS Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, p. 30.

daya alam yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan. Selain itu, distribusi manfaat ekonomi yang tidak adil semakin memperparah ketimpangan, sehingga masyarakat merasa dirugikan baik secara sosial maupun ekonomi. Namun, di sisi lain, konflik ini telah memunculkan dinamika positif seperti solidaritas masyarakat, advokasi lingkungan, dan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Konflik juga memaksa pemerintah dan perusahaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembangunan mereka, membuka ruang dialog kritis, dan memperhatikan pentingnya pendekatan partisipatif untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik sosial tidak hanya menjadi penghalang pembangunan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih inklusif. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengambil pelajaran dari kasus ini, diharapkan pengelolaan konflik di masa depan dapat dilakukan dengan lebih bijaksana melalui mediasi, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat lokal. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan, guna mencegah kerusakan lingkungan dan konflik yang merugikan masyarakat.

E. REFERENSI

Almukarromah, Fatimah, (2024). *Peran sektor pertanian unggulan terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2016-2020*. Tesis. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, dan Zuhrinal M. Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun masa depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8.1.

April, Aprilia Natasya, (2024)."Synergizing Advocacy and Communication: A Strategic Model for Sustainable Development in Non-Governmental Organizations." *Journal of Social and Policy Issues*.

Astuti, Ajeng Windi, "Kajian Teori Pemikiran Adam Smith dan Relevansinya terhadap Perekonomian Masa Kini." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal Vol. 3, No. 2*.

Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin, (2018). "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Daruhadi, Gagah, Pia Sopiati. (2024). "Pengumpulan data penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 3. No. 5.

Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra Moniaga, (2010), *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

https://tirto.id/berebut-tirta-di-tanah-jawara-konflik-air-di-pandeglang-clZ5

https://www.radarbanten.co.id/2025/06/04/pabrik-air-kemasan-segera-berdiri-di-pandeglang/

Karimullah, Suud Sarim, (2025) "Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5. No. 1.

Lestari, Usgia Serly, (2019), *Analisis Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Studi Literatur*. Diss. Universitas Andalas.

Mariyono, J. (2012). *Pembangunan dan Ketimpangan Sosial: Resistensi Masyarakat terhadap Proyek-Proyek Pembangunan*. Jurnal Sosiologi dan Pembangunan, Vol. 10(2), hlm. 123-135.

Najicha, Fatma Ulfatun dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, (2017), "Politik Hukum Perundang–Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1.

Pakpahan, Andrew Fernando, (2021). "Metodologi penelitian ilmiah".

Sagita, Vina, Mega Ilhamiwati, dan Pefriyadi Pefriyadi, (2023). *Dampak Pengembangan Pariwisata Bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Cawang Lama Dalam Upaya Sustainable Development Goals*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, Salam, Agus, *Metode penelitian kualitatif*. CV. Azka Pustaka.

Setiartiti, Lilies dan Rahmat Adiprasetya Al-Hasibi, (2024). *Monograf: Transisi Energi Terbarukan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit P4I.

Suhaemi, Achmad. *Implikasi Ketidakpastian Hukum Larangan Ekspor Nikel Mentah Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Terhadap Industri Pertambangan Mineral Periode Tahun 2020–2022*. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Soekanto, S., & Damsar, (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* ed. revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanto, Dedi, and M. Syahran Jailani, (2023), "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1.1.

Wenas, Jacqualine G., Herman Karamoy, dan Jenny Morasa, (2020). "Perilaku oportunistik pemerintah Kota Manado atas perubahan dana alokasi umum: suatu kajian kualitatif." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. Vol. 7, No. 1.